

KK
Per 68/01
Sat
P

SKRIPSI

UNGGUL PRAYUDHO SATRIYO

**PENYELESAIAN SENGKETA TUBRUKAN KAPAL DI PERAIRAN KEPULAUAN
INDONESIA (STUDI KASUS TUBRUKAN ANTARA M.V. IRIS DENGAN KRI.
PULAU RATEWU DI ALUR PELAYARAN BARAT SURABAYA)**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

**PENYELESAIAN SENGKETA TUBRUKAN KAPAL
DI PERAIRAN KEPULAUAN INDONESIA
(STUDI KASUS TUBRUKAN ANTARA
M.V. IRIS DENGAN KRI. PULAU RATEWU DI ALUR
PELAYARAN BARAT SURABAYA)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas
dan Memenuhi Syarat - Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana di Bidang Ilmu Hukum**

PEMBIMBING

DINA SUNYOWATI, S.H., M.Hum.
NIP : 131 653 449

PENYUSUN

UNGGUL PRAYUDHO S.
NIM : 039714600

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**



Telah diuji dihadapan Panitia Penguji Skripsi

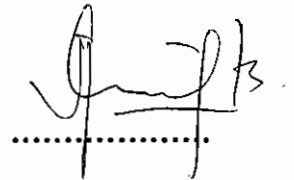
Pada tanggal : 27 Juni 2001

Panitia Penguji Skripsi

Ketua : Dr. H. Abdoel Rasjid, S.H., LL.M.



Anggota : Dina Sunyowati, S.H., M.Hum.



Hermawan Ps. Notodipoero, S.H., M.S.



I Wayan Titib Sulaksana, S.H., M.S.



BAB 4

PENUTUP

1. Kesimpulan

- a. Pada negara kepulauan Indonesia, terdapat tiga rezim perairan. Ketiga rezim perairan ini diatur adalah perairan pedalaman, perairan teritorial (laut teritorial) dan perairan kepulauan. Pengaturan mengenai hak dan kewajiban ketiga rezim perairan ini berbeda, dengan mengakui adanya perbedaan kepentingan dari negara pantai dan negara pengguna perairan. Pemahaman akan perbedaan ini akan memudahkan dalam menentukan rezim hukum apa yang berlaku pada suatu peraturan, sehingga memudahkan penentuan hukum apa saja yang berlaku pada perairan tersebut. Pelabuhan, menurut pembagian ini adalah termasuk bagian dari perairan pedalaman. Dengan pemahaman bahwa pembagian perairan ini turut menimbang berbagai kepentingan pengguna perairan, maka didalamnya terdapat hak-hak perlintasan, yang antara lain adalah hak lintas damai, hak lintas alur kepulauan. Pelaksanaan dari hak perlintasan ini belum dapat semuanya dilaksanakan di Indonesia, karena berbagai hambatan.
- b. Alternatif penyelesaian hukum bagi peristiwa tubrukan kapal yang berbeda bendera, dapat dilakukan menurut hukum Indonesia atau menurut hukum Internasional. Penggunaan alternatif dalam penyelesaian ini sebisa mungkin dapat mengakomodasi kepentingan dari kedua pihak. Adanya sarana hukum

menurut sistim nasional , sangat membantu bagi pemberian jalan keluar bagi penyelesaian tubrukan ini. Mahkamah Pelayaran yang merupakan badan pemerintah, bagian dari fungsi eksekutif, dapat membantu pemeriksaan tubrukan kapal, karena sifat khususnya, dimana mahkamah ini memiliki anggota pemeriksa yang tidak saja berasal dari kalangan hukum (sarjana hukum) tetapi juga dari kalangan pelaut, dapat memberikan hasil pemeriksaan yang lebih mendalam. Walaupun begitu tidak menutup kemungkinan penggunaan alternatif penyelesaian yang bersifat internasional, dimana alternatif ini akan sangat berharga jika salah satu pihak dalam tubrukan ini adalah pihak asing, dengan memberikan sarana penyelesaian yang bersifat internasional, tanpa harus mengedepankan salah satu hukum nasional dari para pihak. UNCLOS, sebagai konvensi rujukan, telah memberikan jalur penyelesaian yang bersifat internasional. Penyelesaian, menurut sistim UNCLOS tidak saja memuat penyelesaian yang bersifat badan peradilan, tetapi juga menyediakan penyelesaian yang bersifat penengahan (arbitrase).

2. Saran

- a. Adanya rezim hukum yang berlaku di perairan Indonesia, telah memuat berbagai hak dan kewajiban bagi negara Indonesia. Luas wilayah Indonesia yang merupakan sebagian besar dari wilayah perairan memberikan arti pentingnya wilayah perairan bagi negara Indonesia. Sistim pengawasan atas rezim hukum di wilayah Indonesia yang terkesan masih kurang, dirasakan